



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUKMAN HAKIM, DR
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
3. NHK : 1001101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.209.493.337

1. Tanah dan Bangunan Seluas 648 m2/648 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.625.184.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 7.347.826.087
3. Tanah dan Bangunan Seluas 466 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 236.483.250

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.316.000.000

1. MOBIL, HONDA ALL NEW HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 406.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI PALISADE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 888.000.000
4. MOBIL, MERCEDES C300 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.700.500.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.631.491.386

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.047.934.514

Sub Total Rp. 31.905.419.237



III. HUTANG

Rp. 2.760.574.285

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 29.144.844.952

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.